



KLIPING MEDIA MASA TAHUN 2015
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

MEDIA MASA

<input type="checkbox"/>	Radar Banten	<input type="checkbox"/>	Kompas
<input checked="" type="checkbox"/>	Banten Post	<input type="checkbox"/>	Media Indonesia
<input type="checkbox"/>	Kabar Banten	<input type="checkbox"/>	Koran Tempo
<input checked="" type="checkbox"/>	Satellite NEWS	<input type="checkbox"/>	

BULAN

JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-------	-----	------	------	-------	------	-----	-----	-----

2016

TANGGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

HALAMAN
1

Catatan

BPK: Tujuan Bisnis BGD Menyimpang

SERANG, BANPOS - Pengelolaan bisnis yang dilakukan PT Banten Global Development dinilai tidak jelas dan tanpa arah tujuan. Bahkan, terlihat jauh dari kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.

Kepala BPK RI Banten, Sunarto mengatakan, Pemprov Banten selaku pemegang saham harus memberikan pembinaan terhadap jajaran personel yang ada di BUMD tersebut.

Lantaran, katanya, dalam menjalankan bisnisnya selama ini tidak terlihat manfaatnya.

"Uangnya mengendap, tidak jalan. Bisnis tujuan BGD harus diluruskan dulu. Jangan dibiarkan seperti ini," kata Sunarto, akhir pekan lalu.

BACA BPK... HAL 7

BPK: Tujuan Bisnis

Sambungan dari Halaman 1

Ia menjelaskan, usaha yang dilakukan oleh PT BGD seperti melakukan Kerjasama Operasi (KSO) atau kerjasama usaha dirasa tidak membawa dampak. "Bisnisnya harus dirumuskan dulu. Misalnya membangun apa untuk masyarakat, misalnya lagi apa yang harus disubsidi. Ini kan kami melihat tidak ada," ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Sunarto, pihaknya mengaku belum masuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan keuangan (APBD) terhadap PT BGD.

"Saya belum masuk, orang yang yang ada belum dibayar (penyerahan modal belum ditransfer), kalau yang kecil-kecil biarlah itu ranahnya inspektorat, dan kalau ada uang yang tidak jelas, maka saya akan

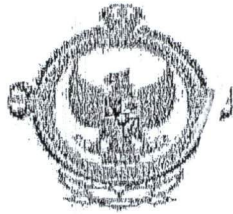
dang-undangan, BPK punya kewenangan untuk itu. "Jangankan uang APBD, APBN pun BPK bisa melakukan audit," tandas Ranta.

Untuk diketahui, selama PT BGD berdiri sejak 10 tahun lalu, ratusan miliar dana dari APBD telah dikucurkan Pemprov, dan digunakan untuk biaya operasional.

Dan terakhir Pemprov telah menganggarkan di APBD Perubahan 2015 sebesar Rp250 miliar dan di APBD murni 2016 Rp385,4 miliar, untuk penyertaan modal Bank daerah.

Namun karena ada keinginan dari DPRD Banten dan evaluasi Kemendagri uang tersebut akhirnya tidak bisa dicairkan dan masih berada di Kasda.

Di lain pihak, Dirut PT BGD nonaktif Ricky Tampinongkol bersama Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar SM Hartono dan Ketua Ranang DPRD Banten dari Fraksi



KLIPING MEDIA MASA TAHUN 2015
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

MEDIA MASA

<input type="checkbox"/>	Radar Banten
<input checked="" type="checkbox"/>	Banten Post
<input type="checkbox"/>	Kabar Banten
<input checked="" type="checkbox"/>	Satelit NEWS

<input type="checkbox"/>	Kompas
<input type="checkbox"/>	Media Indonesia
<input type="checkbox"/>	Koran Tempo

BULAN

JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-------	------------	------	------	-------	------	-----	-----	-----

2016

TANGGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

HALAMAN	Catatan
1	

PBB Setengah Jalan, Kerugian Negara Rp20 Miliar

Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah pekan lalu meminta kepada Gubernur Banten Sekda Banten agar meminimalisasi jumlah temuan, baik bersifat administrasi maupun kerugian negara.

“Ini kan sudah rutin. Seharusnya SKPD sudah melakukan analisis temuan baik itu kekurangan maupun dokumen atau bersifat kelebihan pembayaran berpotensi kerugian negara,” katanya.

“Dari lima gedung utama tersebut nantinya Kantor Bupati dengan desain lima lantai. Nanti juga akan dibangun lahan parkir bawah tanah,” tuturnya.

Wakil Bupati setinggi lima lantai tersebut dilakukan karena memang didesak oleh kebutuhan ruang. Nantinya di gedung terluas selain sebagai kantor kepala daerah akan disediakan juga ruang pertemuan, seperti beberapa ruang cukup luas.

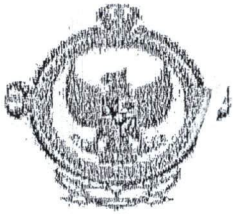
“Tempat pembangunan gedung ini di lahan yang baru, sehingga akan kesulitan jika mendapat fasilitas kedinasan. Oleh karena itu, semua kebutuhan ruang dinas didesain semua berada di kantor bupati ini,” ujarnya. (DWW/AEP)

Puspemkab.....

Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan pada DTRBP Kabupaten Serang Deni Hartono mengatakan, dalam DED di zona gedung utama akan dibangun lima lantai, yaitu Kantor Bupati, Masjid dan Gedung SKPD.

“Yang harus digarisbawahi kepada kepala daerah, jangan ragu untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

▶ **BACA FISIK.... HAL 10**



MEDIA MASA

<input type="checkbox"/>	Radar Banten
<input type="checkbox"/>	Banten Post
<input checked="" type="checkbox"/>	Kabar Banten
<input checked="" type="checkbox"/>	Satelit MEWS

<input type="checkbox"/>	Kompas
<input type="checkbox"/>	Media Indonesia
<input type="checkbox"/>	Koran Tempo

BULAN

JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-------	-----	------	------	-------	------	-----	-----	-----

2016

TANGGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

HALAMAN
1

Catatan

Segera Konsultasi ke BPK

Banyak Aset Pemprov Hilang

SERANG, (KB).- Persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Banten, salah satunya terkait banyaknya aset yang tidak diketahui keberadaannya alias hilang. Biro Aset dan Perlengkapan Setda Banten pun segera berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten.

"Nanti kami akan bekerja sama dengan inspektorat dan BPK sekalian konsultasi. Ini soal aset yang ada catatannya namun tidak ditemukan," kata Kepala Biro Aset dan

Perlengkapan, Djoko Sumarsono, ditemui Jumat (8/1/2016). Ia mengatakan, aset-aset yang tak diketahui keberadaannya wujudnya tersebut didominasi aset jadual dan diyakini dalam kondisi yang nilai ekonomisnya sudah nol atau habis.

"Ya aset-aset tahun 2002, yang jadual-jadual, kebanyakan aset seperti alat-alat kantor. Sensusnya memang tahun 2014, tetapi kan sebelumnya tahu sendiri administrasinya seperti apa," ujar Djoko. Namun, Djoko tak hafal total nilai dari aset-aset yang hilang tersebut. "Saya enggak hafal milainya, yang pasti jauh dari total nilai aset keseluruhan," ucapnya.

Ia menjelaskan, secara normatif aset-aset yang nilai ekonomisnya habis atau rusak dihapuskan untuk

dijelang dan masuk kas negara.

"Normatifnya kalau mau menghapus aset, harus ada wujudnya. Nah, kalau enggak ketemu wujudnya mau sampai kapan? Akan menampel terus. Harus ada keberanian untuk memutus itu. Yang penting ada keyakinan bahwa aset itu ada, bukan karena sengaja dihilangkan. Karena kemarin (tahun-tahun sebelumnya) kan sudah tidak jelas administrasinya," tuturnya.

Konsultasi dengan BPK dan Inspektorat dilakukan agar tetap tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku.

"Penting ikuti aturan main dalam aturan penghapusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Supaya tidak salah di kemudian hari. Kami akan

Dokumen Belum Lengkap

Pemkot Belum Mau Terima Aset

SERANG, (KB).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum melakukan serah terima penyerahan aset tahap dua dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Alasannya karena aset yang akan diserahkan pembekab belum dengan kelengkapan dokumennya. "Kalau sudah lengkap (dokumennya) dari

dulu-dulu diterimanya, karena belum lengkap itu kan (belum diterima). Diverifikasi dulu, misalnya ini loh yang belum lengkap, kembalikan

lagi. Kalau sudah lengkap serah terima dari dulu-dulu juga sudah diterima," kata Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir, Jumat (8/1/2016).

Dalam penyerahan aset tahap dua yang akan diserahkan pembekab, Sulhi membenarkan masih ada aset yang dokumennya belum lengkap. "Ya, oleh karena itu diverifikasi itu artinya mana yang sudah lengkap dokumennya, mana yang

belum. Kalau inventarisasinya banyak yang berserakan, tapi kalau blank tidak ada surat-

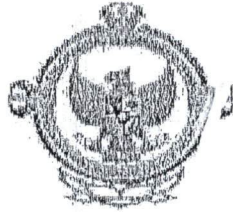
suratnya dan sebagainya, jadi persoalan itu nantinya. Kota Serang bisa enggak dapat pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadinya bisa selalu WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," ujar Sulhi.

Ia mengatakan, aset yang diverifikasi termasuk Alun-alun Barat yang akan diserahkan pada penyerahan aset tahap dua. Sulhi menuturkan, pihaknya tidak masalah jika penyerahan aset dilakukan

bertahap, asalkan semua dokumen lengkap. "Penyerahan boleh satu-satu, bertahap itu mana dulu yang sudah bers atau lengkap, misalnya satu lengkap, kami terima aja, tanda tangan tanda terimanya. Termasuk penyerahan aset rusunawa (di Desa Kelungjun) juga harus lengkap dulu dokumennya. Kota tinggal terima, tapi terimanya yang sudah lengkap," ucapnya.

Untuk verifikasi aset yang akan diserahkan tidak terburu-buru. Semua dilihat mana yang belum lengkap dan sudah

dan sudah hentikan ke sudah le pisah, ba oleh kabu pasti kan. Semer Aset Pen rada tin gal ber dan ber sinyalny kantor je di luar ka katanya



KLIPING MEDIA MASA TAHUN 2015
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

MEDIA MASA

<input checked="" type="checkbox"/>	Radar Banten	<input type="checkbox"/>	Kompas
<input type="checkbox"/>	Banten Post	<input type="checkbox"/>	Media Indonesia
<input type="checkbox"/>	Kabar Banten	<input type="checkbox"/>	Koran Tempo
<input checked="" type="checkbox"/>	Satelit NEWS	<input type="checkbox"/>	

BULAN

JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-------	-----	------	------	-------	------	-----	-----	-----

2016

TANGGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

HALAMAN
1

Catatan

Banprov untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Pengajuan Cepat, Laporan Lambat

SERANG - Bantuan keuangan kabupaten/kota dari Pemprov Banten (banprov) tahun anggaran 2016 sudah dialokasikan dalam APBD Banten. Sayangnya, pemerintah kabupaten/kota tidak merespons dengan baik bantuan keuangan tersebut.

Sebab, laporan pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan tahun anggaran belum disampaikan ke Pemprov Banten sesuai kewajiban mereka. Padahal, LPj menjadi syarat utama pencairan bantuan keuangan tahun ini.

"Kami menyangkan lambatnya penyerahan LPj bantuan keuangan kabupaten/kota. Padahal, DPRD Banten telah memperjuangkan agar setiap tahun bantuan keuangan kabupaten/kota ditambah oleh Pemprov saat pembahasan RAPBD 2016," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni kepada *Radar Banten*, Senin (18/1).

Menurut Nuraeni, kabupaten/kota harusnya profesional dalam mengurus administrasi, jangan sampai hanya cepat saat proses pengajuan, tetapi lambat urusan LPj. "DPRD Banten kan ikut malu, setiap tahun selalu memperjuangkan aspirasi kabupaten/kota tapi urusan LPj selalu molor," ungkapnya.

Politikus Demokrat ini meminta Pemprov melalui Biro Ekbang, Biro Pemerintahan, Inspektorat, DPPKD serta instansi terkait lain untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. "Bagaimana Banten mau mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kalau urusan LPj selalu terlambat," ungkapnya.

Kepala DPPKD Banten Nandy Mulya mengaku telah memperpanjang batas akhir penyampaian LPj bantuan keuangan kabupaten/kota tahun anggaran 2015

itu disampaikan pemerintah kabupaten/kota paling lambat 10 Januari lalu. Namun, dikarenakan kabupaten/kota masih menyusun makanya diperpanjang samper akhir bulan ini," kata Nandy.

Kabid Bina Keuangan DPPKD Banten Toton Suriawinata menambahkan, hingga 10 Januari lalu belum ada satu pun pemerintah kabupaten/kota yang melaporkan bantuan keuangan 2015. "Kami sudah koordinasi dengan Inspektorat dan Biro Ekbang agar mengingatkan kabupaten/kota terkait LPj bantuan keuangan 2015," katanya.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta mengingatkan semua pengguna anggaran wajib melaporkan LPj sesuai batas waktu yang telah ditentukan, termasuk pemerintah kabupaten/kota yang menerima bantuan keuangan setiap tahun dari APBD Banten. "Januari ini semua SKPD wajib melaporkan laporan keuangan tahun anggaran 2015 ke DPPKD, selanjutnya dikaji oleh Inspektorat. Sebelum akhir Maret dilaporkan ke BPK," tegasnya.

Berdasarkan data dari Biro Ekbang Banten, bantuan keuangan kabupaten/kota tahun anggaran 2015 dan 2016 sebagai berikut. Kabupaten Tangerang dari Rp56,351 miliar menjadi Rp152,4 miliar, Kabupaten Lebak dari Rp131.726 miliar menjadi Rp123,7 miliar, Kabupaten Serang dari Rp97.168 miliar menjadi Rp91,7 miliar, dan Kota Serang dari Rp75.850 miliar menjadi Rp64,4 miliar. Kemudian Kabupaten Pandeglang dari Rp64.793 miliar menjadi Rp45,9 miliar, Kota Cilegon dari Rp40,868 miliar menjadi Rp25,8 miliar, Kota Tangerang dari Rp37.893 miliar menjadi Rp21,1 miliar, dan Kota Tangsel dari Rp48.443 miliar menjadi